

UKURAN KOMITE KOMITE AUDIT DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dinal Eka Pertiwi¹, Husaini²

¹*Universitas Muhamadiyah Bengkulu*

²*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*

Abstract

This study aims to analyze the effect of the characteristics of the Audit Committee on the implementation of risk management. The intended characteristics of the Audit Committee are independence, expertise, size, and meetings. This study also uses company size, leverage, and auditor reputation as control variables.

The sample in this study were non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010-2011. Using the purposive sampling method, finally obtained 214 observations. This study uses logistic regression to analyze data.

The results showed that the size of the audit committee had a positive and significant effect on risk management, while independence, meetings, competence had no influence on the implementation of risk management..

Keywords: audit committee, corporate governance, audit committee, risk managemen, risk management committee

1. Pendahuluan

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, (Forum Corporate Governance in Indonesia / FCGI, 2002). Berbagai kasus korporasi dunia yang terjadi pada perusahaan berskala besar seperti Enron, Xerox, dan WorldCom mengindikasikan bahwa kegagalan bisnis perusahaan tersebut merupakan akibat dari corporate governance yang kurang baik. Di Indonesia, corporate governance menarik perhatian untuk dikaitkan dengan kesulitan keuangan. Seperti halnya, kasus yang terjadi pada PT. Bank Central Asia pada tahun 2001 dimana terdapat konflik dalam transaksi saham dan pergerakan harga saham bank tersebut. Hal itu berhubungan dengan adanya pihak manajemen yang mengetahui serta memanfaatkan momentum penjualan saham kepada investor strategis untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi informasi.

Dalam penerapan good corporate governance, komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme good corporate governance dalam melakukan pengendalian internal. Seperti halnya surat edaran BAPEPAM No.SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Lebih lanjut diatur dalam Kep-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki komite audit,

begitu juga Kep-103/MBU/2002 mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit, serta pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit diatur dalam Kep-29/PM/2004.

Menurut FCGI (2002), Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen. Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan corporate governance. Efektivitas kinerja komite audit diukur melalui karakteristik dari komite audit itu sendiri antara lain independensi, keahlian, ukuran dan jumlah rapat komite audit. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit terhadap aktivitas perusahaan. Keahlian yang dimiliki oleh anggota komite audit berhubungan dengan pengetahuan serta pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan dan audit. Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit, sedangkan jumlah rapat berhubungan dengan aktivitas komite audit dalam satu tahun (Anggarini, 2010).

Perusahaan biasanya dalam menjalankan kegiatan usaha akan menemui risiko, sehingga manajemen suatu perusahaan harus menyadari, mengenali, memonitor, dan mengendalikan risiko tersebut karena risiko berhubungan dengan keberhasilan serta kegagalan suatu perusahaan. Informasi mengenai risiko suatu organisasi tidak hanya penting bagi manajemen, tetapi penting juga untuk pemegang saham, pemasok, kreditor, karyawan, dan stakeholder lainnya. Jika berhubungan dengan manajemen risiko maka komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam, tugas komite audit yang berhubungan dengan manajemen risiko adalah melaporkan risiko-risiko yang terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris dan melaporkan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh dewan direksi atau manajemen. Luasnya tanggung jawab serta tugas dari komite audit yang semakin berat menimbulkan keraguan apakah komite audit sudah berfungsi secara efektif. Risiko tidak akan pernah bisa diturunkan sampai level di mana risiko itu menghilang sama sekali. Perusahaan didirikan di atas risiko dan tanpa peran aktif pengusaha, perusahaan tidak akan pernah tumbuh. Dengan demikian, dewan direktur harus berusaha menerima atau meminimumkan risiko yang dihadapi dengan mempertimbang bahwa suatu risiko tertentu bias terjadi dan berdampak pada usaha serta mencari strategi pengendalian risiko yang dapat menguranginya (Cowan, 2004).

Komite audit harus memastikan bahwa tinjauan manajemen risiko telah memberikan nilai tambah bagi proses dengan melaksanakan beberapa kegiatan rinci dan signifikan untuk memastikan bahwa seluruh organisasi telah memahami risiko yang dihadapi pada semua level dan memahami mekanisme yang dilaksanakan untuk mengurangi atau menurunkan risiko. Beberapa pedoman best practice komite audit mensyaratkan bahwa salah satu tujuan komite audit adalah peran mereka dalam manajemen risiko. Di mana fungsi komite audit adalah untuk memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan pengendalian. Komite audit merupakan wahana yang baik untuk pengkajian proses manajemen risiko perusahaan dikarenakan komite audit merupakan komite pengawasan yang tidak memiliki tanggung jawab operasional sehari-hari.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yatim (2009), yang menganalisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap keberadaan komite manajemen risiko di Bursa Malaysia. Pada penelitian tersebut, sampel yang digunakan sebanyak 690 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2003, dihitung dengan analisis regresi logistik. Penelitian Yatim (2009), menyimpulkan bahwa keberadaan komite manajemen risiko secara signifikan berpengaruh positif terhadap independensi komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, keahlian komite audit dan ukuran perusahaan. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap penerapan manajemen risiko pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Agency

Teori agensi merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang telah dipakai selama ini. Teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) dalam bentuk sebuah kontrak kerjasama. Menurut Alijoyo dan Zaini (2004), Agency conflict timbul pada berbagai hal antara lain, Moral-Hazard, Risk Aversion dan Time Horizon. Menurut Khomsiyah (2005), banyak pihak berpendapat bahwa isu Good Corporate Governace (GCG) yang terjadi dilandasi oleh teori agensi, dimana terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik modal (principal) dengan manajemen (agent). Menurut Irwan (2004), untuk menjembatani permasalahan agensi tersebut maka dibentuklah komite audit, karena komite audit diperlukan untuk memenuhi market expectation mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap conduct perusahaan, melindungi kepentingan investor (minority shareholders), Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal, Meningkatkan fungsi auditor internal dan auditor eksternal dan Mematuhi ketentuan regulasi. Oleh karena itu, komite audit dipandang sebagai salah satu kunci pengawasan serta berperan penting bagi terwujudnya lingkungan pengendalian suatu entitas atau perusahaan.

2.2. Komite Audit yang Efektif

. Menurut lampiran surat keputusan dewan direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-339/BEJ/07-2001, peraturan tentang pembentukan komite audit, disebutkan bahwa: "Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat".

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, efektifitas komite audit dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan komite audit dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Komite audit akan efektif apabila mereka independen dari pengaruh manajemen, memahami proses pelaporan keuangan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dezoort et al. (2002), menjelaskan empat faktor dalam menentukan keefektifan komite audit yaitu:

- 1) komposisi: keahlian, independensi, integritas dan objektivitas.
- 2) Otoritas: pertanggungjawaban dan pengaruh terhadap manajemen dan auditor.
- 3) Sumber daya: kecukupan jumlah keanggotaan, akses kepada manajemen, internal dan eksternal auditor.
- 4) Diligent: insentif, motivasi dan ketekunan

2.3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang baik merupakan salah satu yang harus dilakukan oleh manajemen dalam suatu perusahaan sehingga manajemen mampu menerapkan manajemen risiko secara efektif. Di

dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 pasal 1, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. Manajemen risiko menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) diartikan sebagai berikut: “enterprise risk management is a process, effected by an entity’s board of anagement and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identifypotential events that may affect the entity and manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives”

Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengoperasikan kerangka manajemen risiko. Sistem manajemen risiko yang efektif sendiri merupakan suatu kekuatan perusahaan yang membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Subramaniam, et al., 2009).

2.4. Independensi Komite Audit dan Penerapan Manajemen Risiko

Independensi komite audit dilihat dari apakah salah satu dari anggota komite audit tersebut berasal dari komisaris independen atau tidak. Komisaris independen dapat mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan tindakan manajer serta pemilik perusahaan yang menyimpang dari kontrak kerja yang sudah disetujui antara principal dan agent. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance (Ujithanto, 2007). Kondisi tersebut dapat meminimalkan konflik agensi yang terjadi dan mengurangi besarnya jumlah biaya yang menjadi komponen timbulnya biaya agensi.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan sangat penting dengan menambah proporsi komisaris independen, maka perusahaan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap direksi dan risk managemen committee (RMC). Independensi komite audit dilihat dari apakah salah satu anggota komite audit tersebut berasal dari komisaris independen atau tidak. Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mensyaratkan keberadaan komisaris independen pada seluruh perusahaan publik. Keputusan Menteri BUMN No 117/2002 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada BUMN mensyaratkan hal yang sama untuk BUMN. Penelitian Yatim (2009) memberikan sebuah hasil yaitu sebuah dewan dengan proporsi komisaris independen yang besar cenderung untuk membentuk komite manajemen risiko untuk meningkatkan kemampuan pengawasan mereka. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Independensi Komite Audit berpengaruh Positif terhadap Penerapan Manajemen Risiko.

2.5. Keahlian Komite Audit dan Penerapan Manajemen Risiko

BAPEPAM mensyaratkan bahwa anggota komite audit harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan agar komite audit dapat lebih kritis dalam memahami dan menanggapi informasi-informasi dari manajemen. Telah dijelaskan didalam teori keagenan, bahwa untuk mengatasi permasalahan keagenan, maka komite Audit harus mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal. Oleh karena itu,

Komite Audit dengan anggota yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan, sekurang-kurangnya satu orang, diharapkan lebih terlibat aktif dalam proses manajemen risiko yaitu dengan mendukung pembentukan risk management committee (RMC). Menurut penelitian Yatim (2009), keahlian keuangan Komite Audit memiliki hubungan positif terhadap pembentukan RMC walaupun tidak signifikan. Akan tetapi pada penelitian Rahmat (2009), keuangan secara signifikan berhubungan dengan keahlian anggota Komite Audit. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Keahlian Komite Audit berpengaruh Positif terhadap Penerapan Manajemen Risiko.

2.6. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi, anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon 2007). Apabila tidak ada pengawasan dari Komisaris Independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon 2007), sehingga dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya semakin besar Proporsi Komisaris Independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga 2010).

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Syelda dan Lukviarman (2015); Maharani dan Suardana 2014; Prakosa 2014). Dari beberapa penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin rendah penghindaran pajak, namun sebaliknya semakin kecil proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin tinggi tindakan penghindaran pajak.

H2: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.7. Ukuran Komite Audit dan Penerapan Manajemen Risiko

Ukuran dewan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjadi terlibat dalam komite-komite yang dibentuk dewan komisaris yang ditunjukkan untuk manajemen risiko (Subramaniam, et al., 2009). Perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki komite auditnya karena karakteristik ini akan memengaruhi komite audit dalam memberikan pendapat profesional kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, agar lebih efektif biasanya ukuran komite audit dalam suatu perusahaan terdiri dari 3 sampai 5 orang. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Ukuran Komite Audit berpengaruh Positif terhadap Penerapan Manajemen Risiko

2.8. Jumlah Rapat/Pertemuan Komite Audit dan Penerapan Manajemen Risiko

Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan dalam hal menjaga informasi manajemen (McMullen dan Raghunandan, 1996 dalam anggarini, 2010). Menurut Yatim (2009), Komite audit yang lebih aktif dalam mengikuti rapat akan mendukung penerapan

komite manajemen risiko dan mengurangi permasalahan serta risiko dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H4: Jumlah rapat/pertemuan Komite Audit berpengaruh positif terhadap Manajemen Risiko.

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu karakteristik komite audit terdiri dari: independensi komite audit, keahlian keuangan yang dimiliki komite audit, ukuran komite audit, dan jumlah rapat/pertemuan komite audit. Variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, leverage dan kualitas auditor.

a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Dalam penelitian ini penerapan manajemen risiko dilihat pada keberadaan komite manajemen risiko pada suatu perusahaan yang diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana perusahaan yang mengungkapkan keberadaan komite manajemen risiko diberi nilai satu (1), sedangkan perusahaan tidak mengungkapkan keberadaan komite manajemen risiko diberi nilai nol (0).

b. Independensi Komite Audit (ACINDP)

Independensi merupakan suatu keadaan atau posisi dimana tidak ada keterikatan dengan pihak manapun. Independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit. Dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dinyatakan bahwa kedudukan komite audit berada di bawah dewan komisaris, jika ada satu atau dua anggota komite audit berasal dari komisaris independen maka salah satu dari komisaris independen tersebut menjadi ketua komite audit. Independensi komite audit pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. Komite audit Independen (ACINDP) diperoleh dari perhitungan :

$$ACINDP = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{jumlah seluruh anggota komite audit}}$$

c. Keahlian komite audit (ACCOMP)

Keahlian komite audit adalah kemampuan yang harus dimiliki anggota komite audit mengenai pemahaman dan pengalaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan keuangan. Keahlian komite audit diukur berdasarkan rasio anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi. Pengukuran latar belakang pendidikan berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa minimal salah seorang dari anggota komite audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

d. Ukuran Komite Audit (ACSIZE)

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Menurut Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003, pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit adalah anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) dan anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai

ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit. Berdasarkan Surat Edaran Bapepam Nomor. SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen. Ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan melihat seluruh jumlah komite audit.

d. Jumlah Rapat/pertemuan Komite Audit (ACMEET)

Jumlah rapat/pertemuan komite audit adalah jumlah dimana anggota komite audit mengadakan rapat atau pertemuan. Komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Dalam suatu perusahaan, anggota komite audit diwajibkan untuk mengadakan pertemuan/rapat 3-4 kali dalam satu tahun (FGCI, 2002). Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

e. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Beberapa proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. Fungsi variabel kontrol dalam penelitian ini sebagai pengubah yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati. Variabel ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan natural logaritmat total aset yang dimiliki perusahaan (Yatim, 2009).

f. Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh liabilitas. Perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung untuk memiliki biaya agensi yang tinggi pula, dalam hal ini dapat menimbulkan tingginya risiko keuangan yang harus dihadapi. Perusahaan dengan leverage tinggi cenderung untuk memiliki risiko going concern yang tinggi (Subramaniam et al., 2009). Oleh karena itu, diperlukan suatu pengendalian internal yang baik, terkait dengan fungsi pengawasan. Dalam penelitian ini, leverage merupakan perbandingan total liabilitas dan total aset (Yatim, 2009).

g. Kualitas Auditor (BIG4)

Kualitas auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor tersebut. KAP yang tergabung dalam Big Four tersebut antara lain: Deloitte Touche Tomatsu (Deloitte), Pricewaterhouse Coopers (PwC), Ernst & Young (E & Y), Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). Dalam penelitian ini, kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy, yaitu perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang tergabung dalam Big Four diberi nilai satu (1), dan sebaliknya diberikan nilai nol (0) (Yatim, 2009).

3.2 Metode Analisis

Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Adapun persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$RM = \beta_0 + \beta_1 ACINDPi + \beta_2 ACCOMP_i + \beta_3 ACSIZE_i + \beta_4 ACMEET_i + \beta_5 SIZE + \beta_6 LEVR + \beta_7 BIG4 + e$$

Keterangan:

- RM : Risk Management (Manajemen Risiko), dimana 1= menerapkan manajemen risiko dan 0 = tidak menerapkan manajemen risiko).
- ACINDP : Proporsi anggota komite audit independen dibanding dengan keseluruhan jumlah komite audit
- ACCOMP : Keahlian anggota komite audit
- ACSIZE : Ukuran Komite Audit
- ACMEET : Frekuensi pertemuan komite audit selama satu tahun
- SIZE : Ukuran Perusahaan
- LEVR : Total Liabilities/Total Asset
- BIG4 : Variabel dummy, dimana 1 = perusahaan yang diaudit big four dan 0 = perusahaan yang diaudit selain big four
- β_0 : Konstanta
- β_1 - β_7 : Koefisien Regresi.
- e : Kesalahan Residual

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.2. Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Teknik pemilihan sampel yaitu purposive sampling dengan melihat kriteria tertentu. Dari populasi itu terdapat 53 sampel perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko pada tahun 2010 dan 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan tahunan yang memiliki karakteristik komite audit, komite manajemen risiko dan yang tidak memiliki komite manajemen risiko. Dari hasil pengumpulan data terdapat beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel. Daftar sampel perusahaan non keuangan disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sampel Penelitian

Perusahaan Sampel Penelitian	Jumlah Perusahaan
Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010 dan 2011	366
Jumlah perusahaan yang tidak lengkap menampilkan karakteristik komite audit tahun 2010 dan 2011	152
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian	214
Jumlah perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko tahun 2010 dan 2011	53
Jumlah perusahaan yang tidak memiliki komite manajemen risiko tahun 2010 dan 2011	161

Sumber : data sekunder diolah, 2013

3.3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel-tabel berikut Tabel 2. Tabel 2 statistik deskriptif di atas menjelaskan gambaran data yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel independensi komite audit (ACINDP) menunjukkan rata-rata (mean) sebesar 0.3591 > dari standar deviasi dengan nilai sebesar 0.9923. Variabel yang kedua yaitu keahlian komite audit (ACCOMP) merupakan perbandingan dari jumlah komite audit yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan dengan jumlah seluruh komite audit.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACINDP	0.20	1.00	0.3591	0.09923
ACCOMP	0.25	1.00	0.5903	0.23834
ACSIZE	2.00	7.00	3.0841	0.53289
ACMEET	1.00	43.00	6.3458	6.12101
SIZE	18.56	33.89	27.6845	2.13575
LEVERAGE	0.01	6.49	0.5394	0.60926
BIG4	0.00	1.00	0.3271	0.47026
Penerapan Manajemen Risiko	Jumlah	Persentase		
Perusahaan Memiliki Komite Manajen Risiko	53	25%		
Perusahaan Tidak Memiliki Komite Manajen Risiko	161	75%		

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Variabel ACCOMP menunjukkan rata-rata (mean) sebesar 0.5903 > dari standar deviasi dengan nilai sebesar 0.2383. Variabel yang ketiga yaitu jumlah komite audit (ACSIZE). Variabel ACSIZE untuk seluruh perusahaan menunjukkan rata-rata (mean) sebesar 3.0841 > dari standar deviasi dengan nilai sebesar 0.5328. Variabel ACMEET menunjukkan rata-rata (mean) sebesar 6.3458 > dari standar deviasi sebesar 6.1210. Sementara perusahaan yang menerapkan manajemen risiko sebanyak 53 perusahaan (25%) dan yang belum menerapkan manajemen risiko sebanyak 161 perusahaan (75%).

3.4. Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian logistic regression pada model awal (-2LL intercept only) menunjukkan nilai sebesar 239.575 dan pada model final (-2LL Final) menunjukkan nilai sebesar 214.015. Dari hasil -2LL intercept only dengan -2LL Final bahwa terjadi penurunan nilai dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 1 %, maka dapat disimpulkan bahwa model ini adalah model logistic yang baik (fit). Nagelkerke R-Square pada model ini, memiliki nilai 0.167. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel independen memiliki pengaruh kecil 16.7% terhadap variabilitas variabel dependen dan sisanya sebanyak 83.3% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan di dalam model regresi. Berdasarkan nilai Nagelkerke tersebut dapat dikatakan bahwa variabel independensi komite audit, keahlian komite audit, jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit dapat digunakan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap penerapan manajemen risiko atau perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko.

Pengujian untuk hipotesis pertama ingin membuktikan bahwa independensi komite audit (ACINDP) berpengaruh positif terhadap penerapan manajemen risiko. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap independensi komite audit pada model ini, menunjukkan koefisien regresi memiliki nilai sebesar 1.360 yang berarti bahwa semakin independen komite audit maka penerapan manajemen risiko akan semakin baik. Akan tetapi tingkat signifikansi ACINDP sebesar 0.393 > 5 %. Secara statistik koefisien regresi ACINDP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan manajemen risiko. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama. Pengaruh yang tidak signifikan tersebut, menunjukkan bahwa independensi komite audit bukan

merupakan faktor yang paling utama dalam keputusan perusahaan untuk penerapan manajemen risiko.

Tabel 3. Hasil *Logistic Regression* Pengujian Hipotesis

Variabel	Coeff.	Wald	Sig.
Konstanta	9.725	10.602	0.001
ACINDP	1.360	0.73	0.393
ACCOMP	-0.464	0.425	0.515
ACSIZE	1.511	9.726	0.002
ACMEET	0.014	0.227	0.634
SIZE	0.137	2.161	0.142
LEVERAGE	-0.130	0.105	0.746
BIG4	-0.415	1.093	0.296
-2loglikelihood Intercept Only			239.575
-2loglikelihood Final			214.015
Chi-Square			25.560
Model Fitting Sig.			0.001
Nagelkerke R-Square			0.167

Sumber : Data diolah tahun 2013

Pengujian untuk hipotesis kedua ingin membuktikan bahwa keahlian komite audit (ACCOMP) berpengaruh positif terhadap penerapan manajemen risiko. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap ACCOMP pada model ini, menunjukkan koefisien regresi yang negatif sebesar -0.464. Koefisien negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan antara variabel independen terhadap variabel dependen, yang berarti semakin sedikit komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan menerapkan manajemen risiko. Akan tetapi, tingkat signifikansi ACCOMP sebesar $0.515 > 5\%$. Secara statistik koefisien regresi ACCOMP berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yatim (2009), keahlian keuangan Komite Audit memiliki hubungan positif terhadap pembentukan RMC walaupun tidak signifikan.

Pengujian untuk hipotesis ketiga ini ingin membuktikan bahwa jumlah atau ukuran komite audit (ACSIZE) berpengaruh positif terhadap penerapan manajemen risiko. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap ACSIZE pada model ini, menunjukkan koefisien regresi memiliki nilai positif sebesar 1.511 yang berarti semakin banyak jumlah anggota komite audit maka semakin baik penerapan manajemen risiko pada perusahaan, dengan tingkat signifikansi ACSIZE sebesar $0.002 < 5\%$. Secara statistik koefisien regresi ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan manajemen risiko. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga. Menurut Subramaniam, et al., (2009), ukuran dewan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjadi terlibat dalam komite-komite yang dibentuk dewan komisaris yang ditunjukkan untuk manajemen risiko.

Pengujian untuk hipotesis keempat ini ingin membuktikan bahwa jumlah rapat komite audit (ACMEET) berpengaruh positif terhadap penerapan manajemen risiko. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap pertumbuhan perusahaan pada model ini, menunjukkan koefisien regresi memiliki nilai sebesar 0.014 yang berarti semakin sering komite audit mengadakan rapat maka semakin baik penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Akan tetapi, tingkat signifikansi ACMEET sebesar $0.634 > 5\%$. Secara statistik koefisien regresi ACMEET berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan manajemen risiko. Oleh karena itu, hasil penelitian ini

menolak hipotesis keempat. Penelitian ini mendukung penelitian Yatim (2009), kerajinan atau jumlah rapat dewan yang tinggi berpengaruh positif terhadap pembentukan risk management committee (RMC) walaupun tidak signifikan. Koefisien regresi yang positif pada ACMEET menunjukkan bahwa semakin sering anggota komite audit mengadakan rapat maka akan mendukung penerapan manajemen risiko dan mengurangi permasalahan serta risiko dalam pelaporan keuangan dan sebaliknya semakin sedikit anggota komite audit mengadakan rapat maka kesulitan anggota komite audit dalam mendiskusikan penanganan risiko yang dihadapi perusahaan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut. Independen anggota komite audit tidak berpengaruh pada penerapan manajemen risiko, keahlian akuntansi dan keuangan komite audit tidak berpengaruh pada penerapan menerapkan manajemen risiko, ukuran komite audit berpengaruh pada penerapan manajemen risiko, rapat komite audit tidak berpengaruh pada penerapan manajemen risiko. Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap penerapan manajemen risiko, hasil ini berimplikasi bahwa penerapan manajemen risiko ditentukan oleh besarnya komite audit perusahaan. Oleh karena itu seharusnya perusahaan dapat mengangkat lebih banyak komite audit, sehingga menjamin sistem governance perusahaan terutama dalam penerapan manajemen risiko. Penelitian ini terdapat keterbatasan bahwa sampel menunjukkan hanya 25% perusahaan sampel yang menerapkan manajemen risiko, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian dan memperpanjang periode pengamatan.

References

- Alijoyo, A dan Zaini, S. 2004. Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Andarini, P dan Januarti, I. 2012. Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 1.
- Anggarini, Tifani Vota. 2010. Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Bapepam. 2004. Kep-29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta. Badan Pengawasan Pasar Modal.
- Bapepam. 2003. Kep-41/PM/2003 Tentang Struktur Komite Audit di Indonesia dalam Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta: Badan Pengawasan Pasar Modal.
- Bapepam. 2000. Surat Edaran No.SE-03/PM/2000 Tentang merekomendasikan Perusahaan Publik untuk membentuk Komite Audit. Jakarta. Badan Pengawasan Pasar Modal.
- Beasley, M.S. 1996. An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, Vol. 71, pp. 443-465.
- Bursa Efek Indonesia. 2000. No. Kep-315/BEJ/06-2000 Tentang Pembentukan Dewan Komisaris. Jakarta.
- Bursa Efek Indonesia. 2001. No. Kep-339/BEJ/07-2001 Tentang Kewajiban Memiliki Komite Audit. Jakarta.
- Committee of Sponsoring Organization (COSO) of Treadway Commission. (2004). *Enterprise Risk Management Integrated Framework*. Jersey City.
- DeZoort, F. T., D. Hermanson, D. Archambeault dan S. Reed. 2002. Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature. *Journal of Accounting Literature*. Gainesville. Vol.21, hlm.38-76.
- Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). 2002. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance), Jilid II. Jakarta: Citra Graha.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

-
- Ho, Simon S.H, K.S. Wong, 2001, A Study of The Relationship Between Corporate Governance Structure and The Extent of Voluntary Disclosure, *Journal of Internasional Accounting, Auditing & Taxation*, Vol 10, hal 139-156.
- Husaini. 2009. *Komite Audit dan Audit Internal: Integritas Pengawasan Korporasi*. Bandung
- Indriani R dan Khoiriyah W. 2010. Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Informasi Asimetri. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Institute of Internal Auditors (IIA). 2004. *The Professional Practices Framwork*. The IIA Reasearch Fondation.
- Irwan M. Habsyah. 2004. Profit Komite Audit dan Hubungannya dengan Kinerja. *Forum Komite Audit 3: Kontroversi Seputar Slandarisasi Komite Audit – ISIOCOM: Jakarta*.
- Jansen, M.C. and W.H.Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, hlm. 305-360.
- Khomsiyah. 2005. Internalisasi Good Corporate Governance dalam Prosos Bisnis. *The Indonesia Institite For Corporate Governance*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 134.
- McMullen, D.A. 1996. Audit Committee Performance: An Investigastion of the Consequences Associated with Audit Commites. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 15, No. 01, pp. 88-103.
- Peraturan Bank Indonesia. 2006. No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance. Jakarta.
- Pratika, Briana Dita. 2011. Pengaruh Keberadaan Komite Manajemen Risiko Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Bussiness*. Jakarta: Salemba Empat
- Siallagan, H., dan Machfoedz, M. J. 2006. Mekanisme Corporate Governace, Kualitas Laba, dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus*.
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Penerbit: CV. Alfabeta
- Subramaniam, Nava, L.M., & Zhang, J. 2009. Corporate Governance, Firm Characteristics, and Risk Management Committee Formation in Australia Companies. *Managerial Auditing Journal* 24 (4):316-339
- Ujjiyantho, M. A. & Pramuka B. A. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan, *Simposium Nasional Akuntansi X, Juli, Hal. 1-17*.
- Vankataraman, V. 2005. *Audit Committee Handbook*. New Delhi. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited. New Delhi.
- Yatim, Puan. 2009. Karakteristik Komite Audit dan Manajemen Risiko pada Perusahaan Listing di Malaysia. *Malaysian Accounting Review*. Vol 8 No.1, 19-36.